

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Banyumas merupakan hasil nyata dari pragmatisme politik, baik di tingkat kalangan elite partai politik maupun masyarakat sebagai pemilih. Dari sisi partai politik, keputusan untuk mendukung calon tunggal dipengaruhi oleh kalkulasi rasional jangka pendek berupa peluang kemenangan, kekuatan finansial, elektabilitas tinggi, dan stabilitas kekuasaan daripada membangun kompetisi demokratis yang sehat dan regenerasi kader yang berkelanjutan. Koalisi partai yang terbentuk menunjukkan dominasi pertimbangan pragmatis, bukan kesamaan ideologi atau platform politik, yang justru melemahkan peran partai sebagai institusi demokrasi dan agen kaderisasi pemimpin lokal.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, pragmatisme politik tercermin dalam meningkatnya apatisisme, menurunnya partisipasi pemilih, serta kecenderungan memilih berdasarkan manfaat langsung, seperti program bantuan dan janji ekonomi. Masyarakat tidak melihat adanya alternatif pilihan politik yang nyata, sehingga keterlibatan mereka dalam proses demokrasi menjadi minim atau sekedar formalitas. Praktik politik transaksional seperti politik uang tetap terjadi, bahkan dalam kontestasi dengan hanya satu pasangan calon, menunjukkan bahwa politik tetap dibangun melalui pendekatan materialistis. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran kritis di kalangan pemilih tertentu, seperti pemilih muda dan kelompok terdidik, yang ditunjukkan melalui suara signifikan untuk kolom kosong sebagai bentuk protes terhadap pemilu yang tidak kompetitif. Fenomena ini menandakan bahwa meskipun pragmatisme politik mendominasi, masih ada ruang bagi perlawanan terhadap praktik demokrasi.

Studi ini juga menegaskan bahwa fenomena calon tunggal tidak hanya terjadi akibat struktur dan regulasi politik yang membuka peluang, tetapi juga karena interaksi antara

kepentingan partai dan masyarakat. Jika dibiarkan, fenomena ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan fungsi partai politik sebagai institusi kaderisasi dan pembinaan calon pemimpin, revisi regulasi yang mendorong kompetisi sehat, serta peningkatan literasi dan pendidikan politik masyarakat agar partisipasi pemilih stabil dan demokrasi lokal berkembang secara lebih substansif dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan di kedua sisi elite dan masyarakat, demokrasi lokal akan terjebak dalam siklus pragmatisme yang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

